



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kementerian Minta DKI jelaskan Hasil Kajian Tanggul Pesisir

Pemilik properti di pesisir Jakarta justru tak dilibatkan untuk membiayai pembangunan tanggul.

Francisco Rosarians

francisco@tempo.co.id

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menagih penjelasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang kajian terbaru dalam proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/(NCICD). Apalagi pemerintah DKI juga menghapus peran swasta untuk ikut membiayai pembangunan tanggul di pesisir Jakarta itu.

“Karena kami sendiri tak tahu kenapa swasta yang memiliki properti di pesisir Jakarta justru tak diwajibkan ikut membangun tanggul,” kata Andi Baso dari Project Management Unit NCICD, pekan lalu.

Menurut Andi, Kementerian Koordinator Perekonomian telah mengeluarkan amanat pembangunan tanggul di Teluk Jakarta pada akhir 2014. Dalam keputusan tersebut dinyatakan mayoritas pembangunan tanggul akan dikerjakan pemerintah DKI. Kementerian PUPR bersama badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah berneran membantu proyek yang membentang hingga 120 kilometer tersebut.

Selain itu, Kementerian Perekonomian mengamanatkan adanya pelibatan swasta dalam pembangunan tanggul tersebut. Swasta

yang dimaksudkan adalah para pemilik properti atau usaha di sepanjang pesisir Jakarta.

Andi tak mengetahui secara rinci identitas swasta yang sebelumnya berkeajiban ikut membangun tanggul. Dalam draf awal, kata dia, hanya ada dua perusahaan yang tercatat ikut membangun tanggul di 20 kilometer titik kritis pesisir Jakarta. Dua perusahaan itu adalah PT Intiland untuk pembangunan tanggul sepanjang 1,4 kilometer di Pantai Mutiara dan PT Pembangunan Jaya Ancol untuk pembangunan tanggul sepanjang 8,9 kilometer di kawasan Ancol.

“Untuk swasta lainnya, tinggal dilihat properti apa saja yang ada di sepanjang pesisir,” kata Andi. “Total panjang tanggul yang seharusnya dibangun swasta sekitar 14 kilometer.”

Andi menegaskan, pemerintah DKI Jakarta belum pernah mengundang Kementerian PUPR untuk menuntaskan pembangunan tanggul pesisir Jakarta. Padahal wilayah Jakarta terancam rob ekstrem pada 2025. Ketinggain air laut yang masuk ke daratan Ibu Kota bisa mencapai 80-100 sentimeter.

Banjir air laut ini diprediksi terjadi bersamaan dengan gelombang pasang ekstrem pada *moon tidal cycle* (siklus gelombang bulan) setiap 18,6 tahun sekali. Saat itu, air laut diprediksi merendam seluruh kawasan Jakarta Utara dan

mengalir hingga Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. “Jadi, harus serius. Sebelum 2024, proyek tanggul pesisir Jakarta ini harus selesai. Jangan justru diperlambat seperti ini,” ujar Andi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengklaim ada 34 dari 46 kilometer pesisir Jakarta yang belum memiliki penanggung jawab proyek tanggul. Penjatahan pembangunan tanggul di pesisir tersebut sebelumnya dibagi tiga, yaitu BUMN sepanjang 16,4 kilometer, BUMD 7,2 kilometer, dan swasta 14,6 kilometer. Kini, seluruh jatah kosong tersebut rencananya hanya dibagi dua, yaitu Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta.

“Nanti harus dihitung lagi, kan, berapa (kilometer) dan di mana yang jadi tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta,” kata Juaini. ●

“Nanti harus dihitung lagi, kan, berapa (kilometer) dan di mana yang jadi tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.”

Juaini Yusuf

Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kementerian Minta DKI jelaskan Hasil Kajian Tanggul Pesisir

Kajian Tanggul Laut Belum Tuntas

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih melanjutkan kajian pembangunan tanggul laut lepas pantai dalam proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/ NCICD). Kajian proyek NCICD fase B dan C ini rencananya rampung pada November 2020.

"Kabarnya akan dipercepat, selesai Juli 2020," kata Andi Baso dari tim Project Management Unit NCICD, pekan lalu. "Memang fokus dulu yang tanggul pesisir pantai."

Menurut Andi, kajian itu dilakukan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda, Korea Selatan, dan Jepang. Pelaksanaan pembangunan tanggul belum bisa ditetapkan waktunya setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan kajian pembandingan pada November 2018.

"Tapi DKI belum menyerahkan kajian mere-

ka. Jadi, hanya menolak, tapi belum pernah ada uji bareng," kata Andi. "Pemerintah terbuka terhadap setiap kritik dan masukan untuk proyek ini karena mungkin kami ada *miss* di aspek-aspek tertentu."

Koordinator Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Marthin Hadiwinata, menilai pembangunan tanggul di laut akan merugikan masyarakat dan ekosistem. Menurut dia, dalam sejumlah kajian dan penelitian, pembangunan tanggul raksasa di teluk Jakarta berpotensi memunculkan bencana lingkungan.

Adapun Kepala Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta, Juaini Yusuf, mengklaim hanya menjalankan proyek NCICD untuk pesisir pantai. Menurut dia, pemerintah DKI menyetujui pembangunan tanggul karena dinilai dapat mencegah rob. "Kami masih optimistis selesai Juli 2020," kata Juaini.

● FRANSISCO ROSARIANS